

Dinamika China, ASEAN dan Indonesia

Herdi Sahrasad

Pengajar senior ilmu sosial-ilmu politik Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina

Abstract: *That article said that the 21st century is a century belonging to Asia, especially China. By 2050 half the world's gross national product will be dominated by Asia where China is predicted to displace the US to second place and will be the world's strongest player, followed by India in third. Globalization has opened up barriers and boundaries for the movement of information, capital, goods, services, people, as well as state ideology and nationalism. Indonesia, which by Gunnar Myrdal called soft country, should rapidly improve itself to rise and compete in the era of globalization where China is increasingly dominant in competing against the US and its allies in Asia.*

Kata Kunci: China; ASEAN; Indonesia

Pendahuluan

Dengan cadangan devisa China US\$ 3,01 triliun, China ingin menyebarkan pengaruh yang lebih besar di dunia internasional. Pidato Presiden Xi Jinping pada bulan Januari 2017 di World Economic Forum di Davos memuji manfaat globalisasi, dan meminta kerja sama internasional. Celakanya, ekonomi China tengah berada dibawah tekanan utang raksasa yang nilainya mencapai US\$28,2 triliun, atau sekitar Rp366 ribu triliun atau sekitar 100 kali utang luar negeri Indonesia. Utang China telah meningkat dengan sangat pesat sejak tahun 2007. Besarnya peningkatan mencapai US\$20,8 triliun.

China menguasai dua pertiga dari peningkatan utang global dalam rentang waktu tahun 2007 – 2014 sebesar US\$57 triliun. Sekarang utang ekonomi China telah mencapai 286% GDP negara tersebut. Seberapa bahaya kondisi ekonomi China ini? Setidaknya sebagian besar utang berkaitan dengan sektor properti, sekitar 40 -45% dari total utang, terkesan ugal-ugalan, sebab properti itu banyak kosong penghuni. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa pertumbuhan kredit China telah masuk dalam kategori berbahaya karena banyak yang bocor dan macet.

Dalam hal ini, tulisan Perdana Menteri Li Keqiang yang diterbitkan Beijing tak lama kemudian, juga menyerukan keterbukaan ekonomi, globalisasi dan pasar bebas, berbanding terbalik dengan Presiden AS Donald Trump yang menyerukan proteksionisme di Amerika Serikat (AS), padahal AS adalah kam- piun liberalisme, globalisme dan pasar bebas.³

Keterbukaan dan pasar bebas yang disuarakan China itu boleh jadi menandai akhir komunisme ekonomi sebab bagi elite dan masyarakat China, “menjadi kaya itu mulia.” Artinya, komunisme yang cenderung “sama rasa, sama rata” sudah diganti dengan pasar liberal yang diramu dengan sosialisme model China dimana kapitalisme negara dominan, dan kapitalisme privat dibiarkan tumbuh dalam sistem politik yang monolitik, tertutup dan anti-demokrasi.

Pada tahun 2015, China Development Bank menyatakan telah mencadangkan US\$890 miliar untuk lebih dari 900 proyek. Bank Ekspor-Import China mengumumkan awal tahun 2016 bahwa mereka telah mulai membiayai lebih dari 1.000 proyek. Asian Investment Bank yang dipimpin China juga menyediakan pembiayaan untuk hal tersebut.

Oxford Economics memperkirakan empat bank BUMN besar China telah memperoleh pinjaman senilai US\$90 miliar dari negara-negara OBOR (One Belt, One Road) pada tahun

2016. Sementara Credit Suisse memperkirakan China bisa menginvestasikan sebanyak US\$500 miliar di sekitar 60 negara selama lima tahun ke depan.

Banyak yang telah diluncurkan melalui Proyek OBOR sejauh ini, termasuk sebuah rel sepanjang 418 kilometer dengan Laos, dan sebuah kumpulan proyek infrastruktur senilai US\$46 miliar, yang diberi nama Koridor Ekonomi China-Pakistan. Sebuah layanan kereta barang yang menghubungkan China dan Eropa juga tengah digarap. Selain itu China dan Prancis juga bersama-sama mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir Hinkley Point senilai US\$24 miliar di Inggris Raya.

Sebagian besar proyek tersebut banyak melibatkan perusahaan dari China, dari perusahaan minyak dan gas hingga pembangunan perkeretaapian, menganggap perusahaan minyak Sinopec, produsen mobil kereta api CChina dan utilitas seperti State Grid.

Peneliti Tianjie He dari Oxford Economics melihat bahwa dalam jangka panjang, OBOR dapat meningkatkan internasionalisasi renminbi dengan mendorong penggunaannya dalam transaksi perdagangan dan finansial.

China, sebagai negara adidaya dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, berusaha meningkatkan pengaruhnya untuk menggalang banyak negara mewujudkan rencana besar, One Belt, One Road (OBOR). Inisiatif ini dimaksudkan untuk menghubungkan Asia, Eropa, Timur Tengah dan Afrika untuk mendukung perdagangan dan pembangunan. Rencana tersebut bertujuan untuk menghubungkan Asia, Eropa, Timur Tengah dan Afrika dengan jaringan logistik dan transportasi yang luas. Caranya dengan menggunakan jalan, pelabuhan, jalur kereta api, jaringan pipa, bandara, jaringan listrik transnasional dan bahkan jalur serat optik.

Presiden Xi Jinping pertama kali mengumumkan kebijakan tersebut pada 2013. Kemudian dinobatkan sebagai salah satu dari tiga strategi utama nasional China, hingga pada Akhirnya berubah menjadi keseluruhan bab dalam rencana lima tahun saat ini, yang berjalan sampai tahun 2020.

Skema ini melibatkan 65 negara, yang menyumbang sepertiga dari PDB global dan 60 persen populasi dunia, atau 4,5 miliar orang, menurut Oxford Economics.

Kebijakan tersebut dapat mendorong ekonomi domestik dengan permintaan ke luar negeri, dan mungkin juga menyerap beberapa kelebihan kapasitas di industri berat China

Kepentingan ini adalah bagian dari dorongan China untuk meningkatkan infrastruktur modern dengan struktur global dapat menarik lebih banyak investasi dan perdagangan di sepanjang rute OBOR. Ini bisa bermanfaat bagi China barat, yang kurang berkembang, karena terkait dengan negara-negara tetangga. Dan dalam jangka panjang, ini akan membantu China menopang akses terhadap sumber energi.

Ekonomi China

Dengan pertumbuhan ekonomi dua digit selama tiga dekade, China mampu mentransformasikan ekonominya menjadi adidaya dunia. Namun sejak 2016 sampai hari ini, pertumbuhan ekonomi China merosot menjadi 6,7%. IMF mencatat, tiga dekade silam, pertumbuhan ekonomi China mencapai rata-rata 10 persen per tahun, namun pada tahun 2016 lalu hanya 6,7 persen.

Selama tiga dekade itu, pemerintah China berhasil mengentaskan kemiskinan sekitar 200 juta penduduknya. Pada 2004, pendapatan perkapita penduduk China adalah US\$1290. IMF memperkirakan China menyumbang sekitar dua pertiga pertumbuhan ekonomi global dari tahun 2008-2010, sementara pada saat yang sama perekonomian AS justru menyusut 2.6% dengan angka pengangguran yang merangkak naik menjadi 9.5%, angka tertinggi sejak 1983.

Banyak pihak menilai bahwa kesejahteraan ekonomi China akan mengungguli AS. Lalu, Benarkah China akan mengalami kesejahteraan ekonomi yang nyata, merata dan berkelanjutan?

Media mengungkapkan, setiap tahun, semakin banyak penduduk China yang masuk daftar tahunan orang terkaya Forbes. Jumlah orang kaya atau miliarder di China tahun 2015 mampu mengalahkan miliarder di AS, meski pertumbuhan ekonomi China mengalami perlambatan.⁶

Media menyingkapkan, jumlah miliarder di daratan China tahun ini naik dua kali lipat atau 596 miliarder dibanding tahun lalu yang sebesar 242 miliarder. Hal itu berdasarkan daftar orang super kaya di China yang diterbitkan Hurun Laporan Inc dibanding dengan 537 miliarder di AS. Meskipun terjadi perlambatan ekonomi, orang terkaya di China telah melawan gravitasi, tahun terbaik bagi mereka dan menciptakan lebih banyak kekayaan dari negara manapun yang pernah dilakukan sebelumnya dalam satu tahun.

Industri teknologi informasi di China booming sebagai sumber pertumbuhan kekayaan tercepat, dengan jumlah individu dari industri melompat 43% pada 2016 lalu. Pebisnis properti Wang Jianlin menempati posisi pertama sebagai orang terkaya dengan kekayaan sekitar US\$34,4 miliar, menyalip Ketua Eksekutif Alibaba Group Holding. Empat pengembang properti berhasil masuk ke 10 besar, sementara miliarder teknologi menyumbang empat milairder, termasuk pendiri Tencent Holdings Ltd, Pony Ma, yang menempati posisi keempat dengan kekayaan US\$18,8 miliar dan pendiri ponsel Xiaomi Inc, Lei Jun, pada posisi kelima dengan kekayaan USD14,2 miliar.

Sementara itu, pendapatan keluarga di China meningkat tajam, kian banyak orang yang pindah dari pedesaan ke kota sehingga mengakibatkan permukiman rumah melonjak tinggi. Dalam satu dekade terakhir, harga properti naik 5 kali lipat. Pemerintah China berupaya menekan tingginya harga properti dengan mengeluarkan banyak peraturan, namun semuanya hanya berlaku sesaat.

Kemajuan ekonomi China yang pesat bukan tanpa dampak. Kesenjangan terjadi di China antara kaya dan miskin serta antara kota dan desa yang semakin lebar. Indeks gini China bahkan pernah mencapai 4,75. Kesenjangan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, penanganan buruh migran yang buruk, tindakan kekerasan dan kebrutalan serta fitnah terhadap kaum minoritas kini menjadi isu nasional di China.

Ekonomi kapitalis yang diterapkan China berupaya memadukan pendekatan tertutup dan terbuka. Pasar asing tetap terbuka, tetapi negara (Partai Komunis China/PKC dan militer) tetap dominan. Negara ini tetap dipimpin oleh PKC, diktator proletar untuk mengelola, memperkuat dan mendorong seluruh rakyat menjadi masyarakat yang siap dan tahan banting menghadapi peperangan dalam bidang apapun.

Menurut China Labour Watch, 21 Agustus 2007, dalam penelitiannya menemukan adanya “kondisi brutal” dan kekerasan terhadap pegawai di delapan perusahaan China yang memproduksi mainan anak-anak untuk pasar internasional, termasuk di antaranya Walt Disney, Bandai dan Hasbro. Hasil penelitian itu menyebutkan, “Upah rendah, keuntungan tidak ada (relatif kecil), lingkungan kerja sangat berbahaya dan kondisi kehidupan memalukan.” Kapitalisme merah ala China memang keras, keji dan tipikal kaptalisme negara, yang berbeda dengan AS yang lebih mengedepankan kapitalisme swasta (korporat).⁷

Pertumbuhan kapitalisme China sebagai kekuatan kapitalisme negara, memang mengejutkan dunia. Setidaknya, China selama 25 tahun terakhir sampai 2010, terus-menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang spektakular (rata-rata 10-11 % per

tahun), seakan-akan menggugat kebenaran relatif atas tesis adanya hubungan erat antara “demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.”

Militer China

Tahun 2016, anggaran pertahanan China diperkirakan mencapai 954,35 miliar yuan atau setara US\$138,40. Adapun pada tahun 2017 diperkirakan anggaran pertahanan China mencapai 1,02 triliun yuan.

Seolah tak ingin kalah dari China, Presiden AS Donald Trump pun bertekad untuk meningkatkan anggaran pertahanan negaranya sebesar 10 persen dalam anggaran yang diusulkan untuk tahun 2018. Alasan AS, pembangunan militer China - dan proyeksi kekuatan lautnya - telah menyebabkan kekhawatiran di kawasan, di mana China belakangan mengambil sikap yang semakin tegas dalam sengketa teritorial. Beijing telah membangun pulau buatan di terumbu karang di perairan Laut China Selatan, yang juga diklaim oleh negara lain.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dalam laporan April 2016 mengungkapkan bahwa, anggaran militer China meroket hingga 132 persen selama 10 tahun, 2006-2015. Dan kenaikan signifikan ini disebabkan karena konflik yang sedang dihadapi negeri Tirai Bambu itu di Laut China Selatan.

Menurut studi Robyn Meredith dalam *The Elephant and the Dragon* (Quacana, 2008), hingga 2025 China akan memiliki sumber daya pertahanan sebanding dengan yang digunakan militer AS kini. Hal itu bisa dilihat dari anggaran pertahanan yang dikeluarkan pemerintah China.

Sebagai salah satu negara importir senjata terbesar dunia, China tercatat naik dua peringkat ke posisi ke-3 sepanjang 2014. Anggaran pembelian senjata negara tersebut masih terus tumbuh dengan laju yang sangat cepat.

Pada awal 2006, misalnya, China dikabarkan telah mengeluarkan anggaran sebesar US\$35 miliar atau sekitar Rp560 triliun yang dialokasikan untuk membangun angkatan bersenjata. Pada tahun 2008 China menganggarkan US\$121,9 miliar dolar (Rp1.219 triliun; 8,28 % APBN). Bandingkan dengan Indonesia yang hanya menganggarkan US\$3,6 miliar (Rp 36 triliun; 0,24% APBN) pada tahun yang sama.

Sejauh ini, China tengah menghadapi masalah sengketa dua wilayah, yakni Laut China Selatan (konflik dengan Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam) serta Laut China Timur (konflik dengan Jepang). Selain itu, niatan Taiwan untuk merdeka, menambah andil atas kenaikan anggaran militer China. Tambahan belanja pertahanan ini sebagai bagian dari kebijakan Presiden Xi Jinping atas meningkatnya ketegangan di kawasan yang dianggap bisa menjadi ancaman nyata di masa depan.

Tahun 2015, anggaran militer China sebesar US\$215 miliar, atau satu tingkat di bawah AS yang menggelontorkan dananya hingga US\$596 miliar. Sedangkan pada urutan ketiga dan keempat, masing-masing ditempati Arab Saudi (US\$87,2 miliar) dan Rusia (US\$66,4 miliar). Secara keseluruhan, berdasarkan laporan SIPRI, pada 2015 belanja militer dunia mencapai US\$1,67 triliun, meningkat satu persen dari tahun sebelumnya.

Menyoal Laut China Selatan, AS ingin membendung pengaruh China di Asia Tenggara, khususnya dalam persoalan Laut China Selatan. Wilayah ini amat strategis bagi AS maupun China, baik sebagai jalur perdagangan maupun sumber daya alamnya yang berlimpah. Oleh karena itu AS terus menjalin hubungan dengan sekutu-sekutunya, termasuk Indonesia, untuk mengeliminir pengaruh China. Wilayah Laut China Selatan memang menjadi rebutan banyak

negara. Letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan dunia akan menghasilkan keuntungan bagi negara yang menguasainya. Selain itu kandungan kekayaan sumber daya hayati dan mineral yang terkandung di dalamnya juga menjadi pemicu sengketa. Para ilmuwan meyakini dasar laut di perairan tersebut mengandung minyak, gas dan mineral. Negara mana pun yang menguasai Laut China Selatan dapat memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kesejahteraan negaranya. Laut China Selatan juga merupakan area potensial untuk penangkapan ikan, yang dapat menyokong kebutuhan pangan yang kian meningkat di negara-negara Asia.

Namun nilai utama dari Laut China Selatan adalah posisinya yang strategis. Kapal-kapal dari sektor perdagangan dengan nilai lebih dari US\$5 triliun per tahun melewati kawasan tersebut. Komoditas perdagangan tersebut meliputi material mentah, produk jadi dan minyak dalam jumlah besar.

Beijing menganggap Laut China Selatan sebagai halaman belakang mereka sendiri, sebuah perairan bebas di mana angkatan lautnya dapat berlayar tanpa gangguan apapun. Kendati demikian, Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) menyatakan sembilan garis putus atau nine-dashed line di Laut China Selatan tidak berdasar, sehingga China tidak berhak mengklaim sumber daya yang ada di sana. Putusan PCA merupakan kemenangan besar bagi Filipina, yang melayangkan gugatan terkait klaim China ke PCA pada 2013.

Pengadilan yang berada di Den Haag itu juga menyatakan bahwa pulau-pulau artifisial tak berpenghuni yang dibangun China di Laut China Selatan tidak memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut. Putusan PCA semakin memperkecil luas area yang diklaim China. PCA juga menyebut China telah banyak melanggar hukum dan merusak ekosistem Laut China Selatan.

Amerika dan China sama-sama mengincar Laut China Selatan dan Selat Malaka. Malaka memang selat paling sibuk setelah Hormuz. Zhao Yuncheng, ilmuwan dari China's Institute of Contemporary International Relation menulis: "Whoever controls the Straits of Malacca and the Indian Ocean could threaten China's oil supply route."

Masuk akal jika Presiden China Hu Jiantao menegaskan, "Malacca-Dilemma" merupakan persoalan kunci untuk jaminan pasokan energi mengingat 80% impor minyak China melewati Selat Malaka, oleh karena itu keamanan jalur di "selat basah" ini menjadi urgen bagi kelanjutan ekonomi Negeri Paman Mao tersebut. Maka China pun menerapkan konsep String of Pearls. Yaitu strategi China dalam rangka mengamankan suplai energi. Strategi ini mempunyai konsekuensi dibutuhkannya militer modern yang progresif, juga memerlukan akses lapangan terbang dan pelabuhan-pelabuhan. Target jalur yang diincar ialah bentangan perairan dari pesisir Laut China Selatan, Selat Malaka, melintasi Samudera Hindia, Laut Arab dan Teluk Persia. Sehingga kalau kita gambarkan dalam peta, terlihat mirip untaian mutiara atau gambar kalung (Pearls).

Kondisi inilah yang diprediksi bisa meningkatkan suhu konflik terbuka AS versus China di kawasan Asia Pasifik, utamanya Asia Tenggara. Karena AS pun sudah merekomendasikan hal ini lewat Council of Foreign Relations (CFR) pada 2002, dan bahkan sudah digodok secara lebih matang lewat beberapa think tank di Washington. Sehingga kemudian dirumuskan sebagai dasar kebijakan luar negeri Presiden George W Bush yang kemudian dikenal sebagai Project New American Century (PNAC). Pihak perancang kebijakan strategis Keamanan Nasional di Washington tentunya mencermati dengan seksama strategi String of Pearls tersebut.

Implementasi String of Pearls ini memang tergantung fasilitas militer yang memadai di Pulau Hainan; landasan terbang darurat di Pulau Woody, Kepulauan Paracel, jaraknya sekitar

300 mil dari laut timur Vietnam; kontainer fasilitas pengiriman di Chittagong, Bangladesh; pembangunan pelabuhan air dalam di Sittwe, Myanmar; pembangunan basis angkatan laut di Gwadar, Pakistan; pipa melalui Islamabad dan Karakoram Highway ke Kashgar di Xinjiang; fasilitas pengumpulan intelijen di pulau-pulau di Teluk Benggala dekat Selat Malaka dan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, dan lainnya.

Dalam beberapa kasus, AS memberi subsidi pembangunan pelabuhan baru dan fasilitas lapangan udara di negara-negara target dengan kompensasi fasilitas dibuat sesuai standar China. Sehubungan dengan tarik-menarik pengaruh antara AS dan China ini, menarik mencermati pengamatan dan prediksi akademisi Jean Paul Rodrigue. Menurutnya, jalur transportasi minyak dan gas untuk kebutuhan energi di Asia Timur selain melalui Selat Malaka, juga melintas di Selat Sunda, Selat Lombok dan lainnya. Tak boleh dipungkiri, ketiganya merupakan selat vital bagi negara-negara Asia Timur, khususnya China dan Jepang.

Dalam pandangan Rodrigue, jika terjadi hambatan pelayaran di Selat Malaka maka alternatif jalur paling singkat adalah Selat Sunda. Inilah sisi paling krusial dari wilayah seputar Laut China Selatan dan Selat Malaka dalam beberapa tahun ke depan. China sudah mengisyaratkan bahwa hambatan utama implementasi Strategi String of Pearls adalah bercokolnya kapal-kapal perang AS dan sekutu di Singapura.

Semakin menegangkannya hubungan politik antara AS vs China, niscaya memiliki implikasi negatif atas hilir-mudik pelayaran China di Selat Malaka. Shock and awe pun telah ditebar, melalui janji mengirim kapal tempur pesisir (LCS) USS Freedom di Selat Singapura, ujar Laksamana Thomas Rowden (10/5/2012). USS Freedom ialah kapal perang jenis terbaru AS, yang memiliki kecepatan hingga lebih 40 knot serta handal untuk perang di lautan dekat pesisir, mampu menyapu ranjau laut dan menyerang kapal selam. Dari sudut pandang strategis kepentingan nasional China di Laut China Selatan, implementasi string of pearls akan terkendala kalau kelak memuncak friksi antara AS dan China karena penerapan strategi di atas mutlak melalui rute Selat Malaka.

Kini dunia menyaksikan, China yang otoriter dan menolak demokrasi liberal, terus tumbuh ekonominya, meski para analis memprediksi, bukan berarti pertumbuhan China itu akan demikian selamanya.

Sampai sekarang ini, dampak pertumbuhan China makin terasa bagi negara-negara berkembang di Asia Tenggara. “Ancaman China,” suatu istilah yang sering digaungkan Barat, akhir-akhir ini bukanlah karena China yang hebat secara militer, melainkan justru secara ekonomi.

Dalam kaitan China dan AS, hubungan kedua negeri itu seakan “cinta-benci,” diwarnai ketegangan dan persaingan meski kedua negeri berpengaruh itu tetap membangun kerjasama. Akan halnya hubungan China dan ASEAN, makin jelas betapa kebangkitan ekonomi China bisa menyebabkan melambatnya ekonomi ASEAN karena kalah bersaing.

Kapitalisme Merah Ala China

Meski ekonomi China mengalami perubahan fundamental yang memungkinkan kekuatan pasar beroperasi di China, yang kini disebut para analis/ akademisi Barat sebagai Kapitalisme Merah (Red Capitalism), dinamika pembangunan di China masih dipengaruhi prioritas perencanaan ekonomi dalam repelita lima tahunan. Artinya, peran negara tetap dominan dalam mengendalikan ekonomi pasar agar tidak bergerak liar yang justru merusak perekonomian nasional.

Semua itu merupakan rencana kerja yang melibatkan para ekonom, akademisi, dan pemimpin PKC di semua level masyarakat, termasuk rancangan “Rencana Lima Tahun yang KE-12” dalam pembangunan China ke depan yang sudah ditetapkan dalam sidang Kongres Rakyat Nasional 14 Maret 2011.

Target pembangunan energi dan lingkungan hidup sudah dipancarkan, dimana China ingin lingkungan hidup dilestarikan dan menginginkan pula pembangunan yang berkelanjutan (sustainable) untuk mendukung sistem kesejahteraan sosial di China. Di sini target pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, dan itu lebih rendah dari rata-rata 11% selama perencanaan Lima Tahun yang KE-11 sebelumnya.

Kendati memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, China juga menghadapi isu disparitas tajam. Disparitas pendapatan (income) antar provinsi Timur dan Barat di China, kota dan desa, antar golongan sosial, kian tajam dan kian mengkhawatirkan.

Para pekerja mendapat upah 56.000 RMB/tahun, tapi para CEO bergaji 15-20 kali lipatnya. Survei terkakhir mengungkapkan gaji sejumlah CEO di China 9 juta RMB/ tahun dan terdapat 232 CEO meraih gaji lebih dari 1 juta RMB pada 2010. Dalam persepsi elite dan massa di China, ini jelas ketimpangan tajam.¹²

Itulah sebabnya, Beijing kemudian ingin membuat sistem upah nasional yang bisa memangkas jurang pendapatan. China ingin menyerap 9 juta pekerja baru per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan publik di pedesaan dan 8 juta buruh di pedesaan akan ditransfer/dialihkan ke kota-kota per tahun.

China juga memfokuskan diri pada konservasi energi dan pembangunan pro lingkungan (green development) dan tidak lagi memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan. China bagaimanapun merupakan salah satu negara dengan polusi terburuk. World Bank melaporkan 29 dari 30 kota paling tercemar dan polutif di dunia berada di China.

Sumber polusi dominan di China disumbang dari: pertama, industri di kota-kota China dan kedua, rumah tangga China yang sangat tergantung dan mengkonsumsi batubara yang menjadi sumber emisi dan polusi lingkungan, sementara sumber daya air, BBM dan sebagainya tak digunakan secara efisien.

Di masa lalu, China menyatakan komitmennya pada Perjanjian Iklim Internasional yang baru, dan ada langkah mengikat (binding) dengan memakai energi nonfosil meningkat 11,4% dan mengurangi energi nonfosil pada GDP sebesar 16,6% sebelum 2015.

China pun berupaya meningkatkan energi angin, listrik bertenaga air dan nuklir, melaksanakan green ecology dan green development yang berdampak penting dalam modernisasi negeri tersebut di masa mendatang.¹³

Pertanyaannya, apakah mungkin China berhasil melakukan orientasi baru ke strategi pembangunan China yang pro green development itu? Pasalnya, selama ini ekonomi China dikenal berorientasi pada industri berat dan digerakkan oleh investasi yang di dalamnya bercokol kepentingan elite PKC, pejabat negara dan CEO di BUMN-BUMN China yang biasa disebut sebagai “segitiga besi” (Iron Triangle) yang selalu condong keberatan untuk mengubah kebijakan yang tidak berorientasi industri berat dan digerakkan oleh investasi dengan derajat polusi tinggi. Adakah ruang baru untuk merubah kebijakan itu? Persoalan ini sepertinya masih akan menjadi tanda tanya sampai lima tahun ke depan nanti.

Pasar Bebas China-ASEAN

Tepat tanggal 1 Januari 2010 diberlakukan free trade agreement (FTA/ perjanjian perdagangan bebas) ASEAN-China. Negara-Negara ASEAN yang termaksud yaitu: Indonesia , Malaysia , Singapore , Brunai , Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, Thailand dan myanmar. Adapun hasil kesepakatannya yaitu bea masuk produk manufaktur China ke ASEAN, termaksud Indonesia, ditetapkan maksimal 5%, sedangkan di sektor pertanian 0% tanpa pajak sama sekali. Kerangka kerja sama FTA ASEAN – China sebenarnya telah disepakati pada tahun 2002 di masa pemerintahan Megawati dan baru dilaksanakan pada 1 Januari 2010, meskipun di penghujung 2009 Indonesia mulai mengungkapkan keberatannya .¹⁴

Bagi Indonesia sendiri, pasar bebas China-ASEAN dirasakan merugikan, terutama bagi kalangan pengusaha lokal, industri lokal dan sektor pertanian. Hal ini dikarenakan persiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN-China masih dirasa kurang. Kondisi ini berbeda dengan China yang sudah jauh-jauh hari melakukan persiapan yang matang. Apalagi sebelum pasar bebas diberlakukan, Indonesia sudah di banjiri produk-produk dari China yang harga dan kualitasnya lebih bersaing dari produk lokal.

Untuk pasar bebas sejak 2010 ini, produk dari China yang membanjiri pasar Indonesia yaitu komoditas pertanian seperti buah-buahan, gula dan bahkan beras sampai dengan produk industri manufaktur seperti tekstil, mainan, dan elektronik memasuki Indonesia dengan harga murah dan tentu saja kualitasnya tidak berbeda dengan produk lokal. Apalagi China sudah memasok kebutuhan yang dicari konsumen Indonesia ke depannya . Hal ini tentunya akan mematikan industri kecil menengah (IKM), kawasan ekonomi dan industri Indonesia juga bisa terancam bubar. Produk kita tentu akan kalah di negeri sendiri yang bisa berakibat terhadap perekonomian bangsa ini.

Ada yang menarik mengapa China bisa menjual produk dengan harga yang bersaing . Hal ini dikarenakan China bukan saja menjadi produsen skala besar, tetapi juga telah membangun sebuah jaringan perdagangan yang kuat dan terpadu di seluruh dunia . Selain itu upah buruh murah dan industri pokok massal yang sudah terotomatisasi meningkatkan kemampuan produksi. Prinsip dari orang-orang China “untung sedikit tidak apa-apa , asalkan dagangan bisa cepat laku dan kontinyu”, juga telah menanamkan tingkat perputaran uang yang cepat.

Perbedaan harga yang tinggi telah menyebabkan jutaan petani kehilangan pasar lokal, ketika produk nasional berhadapan dengan produk China. Saat ini Indonesia mengalami defisit impor dengan China akibat adanya penghapusan tarif dalam ACFTA.

Namun, tidak hanya Indonesia yang mengalaminya, negara-negara lain di ASEAN juga mengalami hal yang sama. Dilaporkan, akibat pemberlakuan ACFTA, dari sekitar 9.000 produk, hanya sekitar 200 produk yang mengalami masalah akibat dibukanya keran perdagangan antara ASEAN dan China itu. Namun kenyataan di pasar sungguh berbeda. Produk RI kalah bersaing dan para petani dan produsen pun keteteran.

Sayangnya, Menteri Perdagangan pada era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa pemerintah tak akan merenegosiasi perjanjian perdagangan secara bilateral dengan China, meskipun barang-barang asal Negeri Tirai Bambu tersebut membanjiri Indonesia. Alasannya, renegosiasi memakan waktu lama.

Hari demi hari industri nasional kian mengalami keputusasaan karena tak mampu bersaing dengan serbuan barang-barang China. Hal ini akibat dibukanya keran perdagangan bebas tanpa didukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada industri dalam negeri. Mau dibawa ke mana ekonomi kita ini? Segalanya serba tak jelas. Jika keadaan ini terus dibiarkan, dua atau tiga tahun lagi mungkin tidak ada lagi industri di negeri ini.

Perdagangan ASEAN-China per 1 Januari 2010 telah membuat banyak industri nasional gulung tikar karena kalah bersaing. Akibatnya, angka pengangguran diperkirakan melonjak. Pengusaha Indonesia yang coba bersaing dengan produksi China banyak yang gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya.

Dampak Free Trade Area bagi Indonesia

Kalau kita periksa, sejak dimulainya free trade agreement di 14 sektor industri pada 1 Januari 2010, ternyata dampaknya bagi industri dalam negeri negatif. Akademisi Kusnanto Anggoro menilai ada kesalahan yang dibuat di tingkat departemen perindustrian dan perdagangan Indonesia, yang punya visi dan misi berbeda mengenai perdagangan bebas. 15

Kelihatannya ada semacam birokrasi politik atau tidak ada semacam pembicaraan di antara mereka-mereka yang bernaung khususnya di bawah departemen keuangan, departemen perdagangan dan perindustrian. Memang sudah sejak lama, sejak Fahmi Idris menjabat menteri perindustrian, mulai ada perbedaan pandangan mengenai apakah ASEAN – China AFTA itu bisa dilaksanakan 1 Januari 2010.

Beberapa pengamat di AS seperti Yoseph Nye mulai menggunakan istilah bahwa China mulai menggunakan soft power untuk mengembangkan pengaruhnya secara global di banyak tempat. Mulai dari Asia Tenggara, Timur Tengah dan bahkan hingga ke Afrika. Praktis, China mendapat ruang yang amat kuat hingga menjadi persoalan ketika Indonesia dan dalam hal ini bersama dengan ASEAN, berhadapan dengan China. Lalu bagaimana ASEAN harus mempertahankan diri?

Di satu sisi Indonesia dihadapkan pada soal tidak mungkin untuk melaksanakan diplomasi sendirian, atas basis bilateral, tapi di sisi lain Indonesia juga mau tak mau harus terlibat percaturan perdagangan yang lebih global. Apalagi dalam konteks perekonomian, antara China dan Indonesia berbeda dengan Indonesia – Jepang. Antara Indonesia-Jepang lebih ada saling ketergantungan, sementara dengan Indonesia-China punya persamaan komoditi yang akhirnya berujung pada kompetisi harga, yang paling murah dia yang menang.

Perdagangan antara negara-negara di Asia Tenggara dengan China dinilai bisa menguntungkan Indonesia jika aturan-aturan dan formatnya benar-benar diaplikasikan dengan benar. Jika tidak, China bisa lebih jauh dominan dibanding negara-negara di ASEAN ketika perdagangan bebas diberlakukan. China bisa saja lebih menguasai perdagangan karena produktivitas tenaga kerjanya yang tinggi dan mampu memproduksi secara massal.

Indonesia sendiri harus menentukan format-format yang tepat agar perdagangan bebas ASEAN-China tersebut tidak sampai mematikan industri di dalam negeri. China jauh lebih agresif mendorong ekspor ke luar negeri dalam bentuk skim-skim kebijakan dan mendorong industri bersaing secara produktif. China bahkan menerapkan tarif pajak hingga 0% yang secara langsung menekan harga ekspor.

Arus Modal Asing ke China

Aliran modal asing ke China terus berjalan. Hingga saat ini China tetap merupakan negara yang menjadi tujuan aliran modal asing (foreign direct investment/FDI) di Asia. Dalam konteks ini, sebagai negeri di kawasan Asia, Indonesia mestinya harus lebih progresif dan atraktif dalam menarik investasi asing itu jika tak mau tertinggal jauh di belakang China (dan India).¹⁶

Pada tahun 2007, China mendapatkan FDI terbesar di Asia. Pada tahun 2008 ini aliran modal itu diperkirakan berjalan konstan. Artinya, China tetap menjadi tujuan utama FDI

kategori pasar yang tengah berkembang. China diperkirakan kini memiliki cadangan devisa US\$1,3 triliun.

Merujuk pada laporan The Economist pada 2007, hasil survei dan analisis mengenai kecenderungan prospek investasi dunia 2007-2011, tahun 2007 FDI ke China naik menjadi US\$80 miliar dan tumbuh secara stabil hingga melampaui US\$90 miliar pada akhir masa perkiraan.

China masih dipandang oleh banyak perusahaan internasional sebagai tujuan investasi yang diminati. China sendiri berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dapat mendorong daya saing harga FDI China.

Meskipun demikian, beberapa faktor dapat menjadikan FDI di bawah per- kiraan. China meskipun terbuka terhadap modal asing dan dalam beberapa aspek akan lebih meliberalisasikannya, terdapat tanda-tanda ketidak- nyamanan di China dalam hal FDI dan proteksionisme FDI yang terjadi di banyak tempat lain.

Berdasarkan laporan Konjen RI di Hong Kong tahun 2005-2007, negara itu kini menjadi tempat menarik bagi banyak perusahaan yang berhubungan dengan barang-barang konsumsi yang hampir semuanya diimpor serta untuk jasa termasuk jasa keuangan. Meskipun demikian, alasan utama berinvestasi di Hong Kong adalah lingkungan institusional yang berpihak pada bisnis dan kedekatannya dengan China.

Hong Kong terus-menerus menyediakan pijakan bagi berbagai perusahaan asing yang melakukan bisnis di China. Lokasinya yang strategis mendorong perkembangannya sebagai pusat keuangan regional utama. Tidak seperti China Daratan dan Singapura, secara tradisional Pemerintah Hong Kong tidak menyediakan insentif khusus bagi para investor asing dengan alasan bahwa lingkungan bisnis yang terbuka telah dengan sendirinya menyediakan lingkungan yang ramah investasi.

Di bawah China, Hong Kong tetap menjadi entitas ekonomi terbuka dengan investasi asing yang mendapat perlakuan sama dengan investasi domestik. Meskipun China berusaha untuk menarik investasi asing langsung ke China Daratan melalui pusat-pusat bisnis, seperti Shanghai, sejumlah besar per- sahaan tetap akan lebih tertarik ke Hong Kong karena kelebihan aturan dan infrastrukturnya.

Bank Pembangunan Asia (ADB) pun tak ragu menunjuk perekonomian China dan India sebagai pendorong meningkatnya prospek perekonomian di wilayah Asia, setelah pertumbuhan di semester 11-2009 mengalami kenaikan. Dalam laporannya, ADB memproyeksikan negara-negara ini akan berada pada jalur cepat pemulihan. Pertumbuhan 2009 negara berkembang Asia sebesar 5,2 persen atau diatas prediksi awal. Ini menandai keberadaan rebound yang sehat pada 2009 saat terjadi pelemahan ekonomi global.

Almarhum Ignatius Wibowo (sinolog UI) pernah berpendapat bahwa suatu “kegeraman historis” telah mengikat dan membuat pemimpin dan rakyat China untuk mengadopsi productivity culture –suatu konsep Michael Porter yang berkaitan dengan competitive advantage of the nation-. Di sini, rakyat dan pemimpin China meminimalisir perbedaan ideologis, perbedaan etnis, perbedaan-perbedaan lain, dan bahu-membahu bergerak membangun negara, dan hasilnya nyata.

Kesimpulan

Akankah China Terus Berjaya?

Guru besar Ekonomi-Politik Internasional di Harvard University, Dani Rodrik, melihat pertumbuhan ekonomi China yang meroket tidak akan selamanya terjadi. Menurutnya, China di

masa depan bukanlah negeri yang bakal mengambil alih kepemimpinan ekonomi global untuk waktu yang lama. Meski penduduknya yang berjumlah 1,3 miliar jiwa mengalami pertumbuhan ekonomi yang menguat, dan meski ekonomi China sebagai raksasa memikat radar global, China masih jauh dari mampu untuk bisa mengambil alih kepemimpinan ekonomi dunia sebagaimana AS.

Keberhasilan modernisasi ekonomi China memang mengejutkan masyarakat dunia. Namun menurut Rodrik, citra China sebagai raksasa dunia dengan kombinasi ekspor dan strategi diversifikasi ekonomi maupun inovasi institusi, bukanlah gambaran yang tanpa persoalan. Bahkan gambaran itu tidak semuanya indah.¹⁷

Impor AS dari China menjadi kambing hitam atas upah yang stagnan di AS, sementara surplus dagang China dengan AS menyebabkan ekonom peraih Nobel yakni Paul Krugman mengeluhkan betapa kebijakan merkantilis negeri China itu mengorbankan ekonomi AS dan menimbulkan PHK jutaan tenaga kerja di AS. Selain itu, China juga dikecam melakukan pelanggaran HAM, mengeruk sumber daya alam dari Afrika dengan tata kelola yang buruk, dan celaknya tata kelola pemerintahan di negara-negara Afrika juga jauh lebih buruk lagi.

Surplus dagang China dengan AS yang berlebihan menciptakan ketimpangan global antara AS dan China. Surplus dagang China meningkat 11 persen dari GDP menyusul krisis finansial di AS dan Eropa tahun 2007. Ketimpangan dan ketidakadilan ini, kata Rodrik, meningkatkan permintaan global bagi barang-barang China dengan cost yang berkurang di tempat lain, sehingga menimbulkan komplikasi bagi recovery ekonomi di seluruh dunia. Hal itu juga mengganggu sektor manufaktur di seluruh dunia, termasuk China sendiri. Tapi masalahnya bukan hanya semata ekonomi.

Secara historis, ketimpangan dagang itu juga menciptakan “lahan subur” bagi proteksionisme. Jika surplus dagang China atas AS, tidak berkurang, maka AS akan membalas dengan membatasi impor dari China, dan ini mengundang reaksi balasan dari Beijing dan reaksi yang sama dari negeri lain.

Menurut Rodrik, kemunduran dan pukulan balik politik AS atas globalisasi dan perdagangan China secara umum akan jadi kenyataan. Apalagi sistem otoriter China juga membikin masalah moral di negara-negara demokrasi dimana nilai-nilai dan sistemnya berbeda. Akhirnya, ketegangan China vs AS ini sulit dikelelola dan dikendalikan. Sementara China terus meraih keunggulan ekonomi, AS/Barat justru terus merugi.

China diperkirakan mungkin hanya akan menjadi pemimpin Asia ke depan, dan China berpeluang menggantikan peran AS yang mengalami kemunduran sebagai pemimpin regional di Asia Pasifik. Negara-negara Asia Timur tidak gembira dan tidak suka dengan kebangkitan China di luar negeri, menggantikan peran AS. Korsel dan Jepang sudah bersikap semacam itu dan mengisyaratkan kecemasannya, sikap Vietnam, dan Indonesia serta Negara Asia Tenggara lainnya serupa meski tak sama.

Ada ketidakpercayaan yang merata di Asia Timur dan Tenggara atas China yang punya ambisi regional. Sehingga kawasan Asia ini menilai penting kehadiran militer AS sebagai penjaga stabilitas regional. Kasus Kepulauan Spratley tetap meyakinkan Asia Timur dan Tenggara tentang pentingnya payung keamanan dari AS. Jepang dan Korsel sudah meminta payung perlindungan AS menghadapi manuver militer China.

Dengan langkah China sebagai kekuatan besar di Asia, ada perasaan tidak nyaman dari Jepang dan Korsel serta Negara-negara di Asia Tenggara, maka AS diharapkan mampu menjadi counter balance force atas naiknya penempatan militer China dan ekonomi Beijing di kawasan ini. Bagaimanapun “power game” akan berkembang di Asia dan untuk

itu, kehadiran AS sebagai balance of power - meminjam perspektif Hans Morgentau (sang teoritis realis dalam hubungan internasional) , sangat dibutuhkan negara-negara di Asia untuk membatasi ruang gerak militer China.¹⁸ [*]

Bibliografi

- Carl Walter and Howie Fraser, *Red Capitalism* (Singapore: John Wiley and Sons, 2011).
- Dani Rodrik, *The Globalization Paradox, Democracy and The Future of the World Economy*, (New York & London: WW Norton and Company, 2012).
- Gregory G. Holyk, "Paper Tiger? Chinese Soft Power in East Asia," *Political Science Quarterly*, Vol.126, NO.2, Summer 2011.
- Herdi Sahrasad, "Cina dan Aliran Modal Global," *Republika, Opini*, 18 Februari 2008
- Inilah.com, "Mengupas Ekspansi Pintar China dengan OBOR," <http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2378118/mengupas-ekspansi-pintar-china-dengan-obor>, diakses 10/5/17 pkul 22,00
- Kield Erik Brodsgaard , "A Note on China's 12th Five-Year Plan: Content and Implications," *Copenhagen Journal of Asian Studies*, Volume 29, ISSUE.2, 2011.
- M Arief Pranoto , "Menggali Urgensi Selat Sunda dalam Pertikaian Global dari Perspektif Geopolitik," <http://theglobal-review.com/menggali-urgensi-selat-sunda-dalam-pertikaian-global-dari-perspektif-geopolitik-bag-1/>
- Putri Shabrina Amanda, "Hubungan Diplomasi Indonesia dengan China mengenai Free Trade Area," makalah, Jakarta, 2 Juni 2010.
- Salamuddin Daeng, "Utang Raksasa China dan Jokowi," *Laporan Riset, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)*, Jakarta, 2017.